

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DPRD Tegaskan Tidak Ada Hotel di TIM

## Anggaran Revitalisasi Dipotong Rp 400 M

### Gambir, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menekankan nota kesepahaman (MoU) dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 senilai Rp 87,956 triliun.

Atas hasil itu Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, meminta Pemprov DKI untuk tidak menyembunyikan usulan anggaran. "Ini kan kadang-kadang, ya .. mohon maaf jangan *ngumpetin* anggaran, buktinya kemarin (Rapat Pimpinan Gabungan/Rapimgab) terlihat," ujar Prasetio, Kamis (28/11).

Prasetio mengungkapkan, saat rasionalisasi anggaran pada Rapimgab, Rabu (27/11), terlihat ada upaya Pemprov DKI yang terkesan menyembunyikan anggaran. Contohnya pada Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang diturunkan sekitar Rp 1,9 triliun.

"Sekarang *kan* jadinya (PMD) malah Rp 2,7 triliun, dan saat rapat kemarin Jakpro juga tidak mampu meyakinkan saya. *Nah*, penyisiran di DPRD yang bisa menjawab akhirnya saya putuskan jadi Rp 2,7 triliun," kata Prasetio. Dalam rapat itu, PMD untuk Jakpro sempat diturunkan dua kali dari pengajuan awal. Dalam rancangan KUA-PPAS, awalnya Jakpro mengajukan PMD sebesar Rp 4,6 triliun.



Warta Kota/ABN

Sebelum Rapimgab pada Rabu (27/11), Pemprov DKI melakukan penyisiran anggaran secara internal, sehingga nilainya turun menjadi Rp 3,1 triliun. Dalam Rapimgab, justru dewan mempertanyakan rencana pembangunan hotel dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) senilai Rp 400 miliar.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu, lanjut Prasetio, tidak mampu memaparkan secara sistematis saat rencana pembangunan hunian itu. Bahkan Prasetio sempat memberikan waktu kepada Jakpro untuk menghitung ulang, hingga akhirnya Prasetio memutuskan anggaran pembangunan senilai Rp 400 miliar itu dipangkas.

Karena itu, PMD yang diterima Jakpro saat ini menjadi Rp 2,7 triliun. "Jadi *nggak* ada hotel, karena mereka sudah kami potong Rp 400 miliar, tidak boleh ada hotel. Kalau mau revitalisasi ya .. revitalisasi yang baiklah. Jangan sampai ada komersialnya karena kiri dan kanan (TIM) sudah ada hotel," katanya. (faf)

## Bakal Dibawa ke Manajemen

Meski ditentang DPRD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) belum memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan wisma berbintang dalam proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Jakpro masih menunggu keputusan dari Pemprov DKI Jakarta. "Kami baru terima (keputusan) kemarin (Rabu, 27/11), sehingga kami perlu buat alternatif seperti apa dan nanti dilaporkan kepada pemegang saham (Pemprov DKI)," kata Hani Sumarno, Sekretaris Perusahaan PT Jakpro, Kamis (28/11).

DPRD DKI Jakarta memangkas dana Rp 400 miliar dari Rp 600 miliar di tahun 2020 untuk pembangunan wisma dalam proyek revitalisasi TIM. Pemangkasan itu dilakukan saat Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DKI pada Rabu (27/11).

"Jadi belum ada hasil akhir, baru kemarin dipotong, sehingga akan kami bawa ke manajemen untuk kemudian dilakukan

perubahan," ujar Hani.

Menurut Hani, aspirasi yang disampaikan DPRD DKI saat rapat itu telah diterima lembaganya. Sebagai perusahaan yang mendapat tugas, semua langkah yang diambil harus mendapat persetujuan dari lembaga di atasnya.

Kata dia, pembangunan wisma TIM merupakan bagian kecil dari gedung yang di dalamnya terdapat plaza sebagai sarana seniman berdiskusi dan latihan. Di sana juga terdapat perpustakaan dan galeri seni.

"Memang di tahapan pertama (wisma), setelah *grounbreaking* sudah ada kontraktornya. Kami sudah kontrak yang jelas semua selesai 2021 bulan Oktober," imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Jakpro juga berencana akan berkoordinasi dengan WIKA Gedung sebagai pelaksana proyek. Koordinasi itu dilakukan menyusul adanya pemangkasan anggaran revitalisasi dari Rp 600 miliar menjadi Rp 200 miliar pada 2020. "Kami harus duduk bersama dulu, kemudian nanti ada hal apa yang perlu diputuskan dari diskusi bersama sehingga dilaporkan kepada pemegang saham," katanya. (faf)